

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.P.Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*, Cetakan Pertama, Bandung: CV.Mandar Maju.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Achmad Ali Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Adrian Sutedi, 2017, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika

_____, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Arif Suhattanto, 2017, *Prosiding Seminar Nasional: Prolebmatika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, Jakarat: Universitas Trisakti

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss

Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Nasional.Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.

_____, 2000, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.

_____, 2007, *Menuju penyempurnaan hukum tanah nasional perkembangan pemikiran perkembangan pemikiran dan hasilnya sampai menjelang kelahiran UUPA tanggal 24 September 2007*, Jakarta: penerbit Universitas Trisakti.

_____, 2008, *Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelakasanaannya*, Jakarta: Djambatan.

Cekli Setya Pratiwi, et.al, 2016, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: LelP

- Cst Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Cornelis Van Vollen Hoven, 2013, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, Yogyakarta: STPN Press
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Cetakan I, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Faried Ali, 1997, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Garaika, Darmanah, 2019, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Hira Tech
- Imam Koeswahyono, 2008, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Bagi Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset Percetakan.
- _____, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penluisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Iskandar, Mudakir. 2010. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Grafika.
- Julius Sembiring, 2016, *Tanah Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Kartini Muljadi, Gunawan W, 2014, *Hak-Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta: Prenada Media.
- M. Arba, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria W Sumardjono, 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas.

- _____, 2010, *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Yogyakarta: Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjadara.
- Maria S. W. Sumardjono, 2011, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Paulus Effendi Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Purwaningdyah, Agus Wahyudi, 2014, *Modul Konsep Dasar Administrasi dan. Administrasi Pertanahan*
- Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purbandari, 2019, *Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Berupa Tanah*, Repository Universitas Mpu Tantular Jakarta
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pres.
- Sembiring Jimmy Joses, 2019, *Panduan Mengurus Sertipikat Tanah*, Jakarta: Visimedia.
- Soetrisno Hadi, 2005, *Metodologi Reseach 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Somardi, 2007, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia

- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sulaeman Jajuli, 2017, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* Jakarta: Deepublish
- Supriyadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Urip Santoso, 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yamin Lubis M, Abd. Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan tanah*, Bandung: Mandar Maju
- Zaidar, 2009, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C. Jurnal

Agus Yafli Tawas, 2013, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Unsrat, Volume 1 Nomor 6

Cici Mindan Cahyani, 2021, Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undan-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Private Law, Vol. 1 Issue. 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dwi Laksa Marabintang, Suriyaman M Pide, 2022, Balik Nama Pada Sertifikat Yang Mengadung unsur Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Volume. 5 Nomor. 2

Eka Nurcahya, 2019, Pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pemerintah Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Dinamika, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis.

Ilham, Djauhari, 2017, Permohonan Hak Milik Yang Berasal dari Tanah Negara, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3

Joshua Melvin Arung La'bi, 2021, Analisi Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Tanah Tongkonan di Kabupaten Toraja Utara, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Manto Siregar, 2018, Pengadaan Tanah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Dalam Upaya Mewujudkan Proyek 35.000 MW, Jurnal Hasanuddin Law Review (Harlev), Vol.7.

Muhammad Ilham Arisaputra et al, 2017, *Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume. 20 Nomor. 2

- Nisa Atriana, 2014, Kepastian Hukum Atas Tanah Asset Pemerintah Kota, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Pandu Eka Pramuditya, 2016, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Negara, Jurnal Repertorium, Volume 3 Nomor 2
- Sahnun, 2019, *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume. 7, Nomor. 3
- Sitorus, Oloan, 2016, Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria: Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Pertambangan,” Jurnal Bhumi, Volume. 2, Nomor. 1
- SJDI Hukum, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara & Pengelolaan, Pusat Hukum & Humas BPN RI
- Sundari M dan Ma’rif S, 2013, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik*, Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, Volume. 9 Nomor.2
- Solechan, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yan Baik dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Administrative Law & Governance, Volume. 2 Nomor 3
- Sri Susyanti Nur, 2015, Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah, Jurnal Hasanuddin Law Review, Volume. 1 Nomor. 1
- Urip Santoso, 2013, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Tanah*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume. 13 Nomor. 1
- Wayan A, dkk, 2021, Pelepasan Hak ATas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2 Nomor 3

Lampiran





[< Kembali](#) Lahan Tanah Bermasalah 202...



NO	PENGUNAAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Jalan masuk pelabuhan Garongkong	Kecamatan Barru, Kelurahan Mangempang, Lingkungan Garongkong	terbit sertifikat atas sisa tanah pembebasan lahan Jalan Garongkong
2	Tanah Reklamasi Pelabuhan Garongkong	Kecamatan Barru, Kelurahan Mangempang, Lingkungan Garongkong	Klaim atas tanah hasil reklamasi Pelabuhan Garongkong.
3	Pasar Siddo	Kecamatan Soppeng Riaja, Desa Siddo	Klaim atas tanah pasar Siddo, seluruh penduduk desa beranggapan bahwa yang bersangkutan mengada-ada dengan bukti surat girik yang tidak ada penjelasan kepemilikan dan lokasi apapun.
4	Tanah adat turun sawah La Rumpia	Kecamatan Barru, Kelurahan Mangempang, Lingkungan Mangempang	Klaim yang mengaku sebagai ahli waris, tetapi tanpa didukung bukti apapun.
5	SMPN 2 Siddo	Kecamatan Soppeng Riaja, Desa Siddo	Klaim yang mengaku sebagai ahli waris, tetapi tanpa didukung bukti apapun.
6	Puskesmas Lisu	Kecamatan Tanete Riaja, Desa Lisu.	Mantan PNS yang bertugas di Puskesmas diberi izin untuk tinggal didalam Puskesmas tetapi kemudian berniat mengklaim tempat tinggalnya sebagai hak milik, yang bersangkutan tidak memiliki bukti apapun.